



Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



PEDOMAN TEKNIS

PEMANTAUAN PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL KESEHATAN REPRODUKSI



2015

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

613.94
Ind
p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
**Pedoman teknis pemantauan pencapaian akses universal
Kesehatan reproduksi.**— Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
2015

ISBN 978-602-235-980-7

1. Judul I. REPRODUCTION
II. HEALTH DATA III. HELATH STATUS INDICATORS
IV. DATA COLLECTION

PEDOMAN TEKNIS

PEMANTAUAN PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL KESEHATAN REPRODUKSI

Kata Pengantar

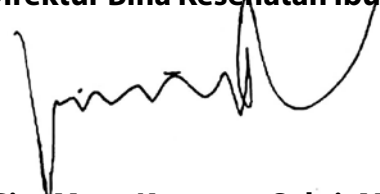
Buku Pedoman Teknis Pemantauan Pencapaian Akses Universal Kesehatan Reproduksi diterbitkan sebagai acuan dalam penyediaan dan pemantauan indikator Akses Universal Kesehatan Reproduksi (AUKR) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Buku ini disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari studi kelayakan terhadap ketersediaan indikator akses universal kesehatan reproduksi pada 10 kabupaten lokasi bantuan UNFPA yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Mamasa, Mamuju Utara, Timor Tengah Selatan, Alor, Manggarai, Jayapura, Merauke, dan Manokwari; rapat koordinasi di tingkat pusat yang melibatkan 10 sektor/lembaga terkait; pertemuan pusat dan daerah serta uji coba di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jayapura, Timor Tengah Selatan, Kotamadya Jakarta Timur dan Kota Bogor.

Buku pedoman teknis ini terdiri dari 4 bab yaitu; (1) Pendahuluan; (2) Indikator Akses Universal Kesehatan Reproduksi; (3) Mekanisme Penyediaan Data Akses Universal Kesehatan Reproduksi; dan (4) Penutup. Buku ini berisi penjelasan jenis dan kategori indikator program program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi serta menyajikan informasi tentang langkah-langkah dalam penyediaan dan pengumpulan data indikator AUKR di setiap sektor yang terlibat serta mekanisme koordinasi dalam pengumpulan data tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan hingga terbitnya buku **Pedoman Teknis Pemantauan Pencapaian Akses Universal Kesehatan Reproduksi**. Kami menyadari tentunya buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran/masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini di masa datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan program kesehatan reproduksi dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Bina Kesehatan Ibu,



dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA

NIP 195706221985112001

Kata Sambutan

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara global. Upaya pemenuhan hak reproduksi pertama kali didiskusikan pada *International Conference on Population Development* (ICPD) tahun 1994 yang merupakan *milestone* (tonggak awal) perubahan paradigma dari pendekatan kuantitatif pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi pendekatan hak asasi manusia (HAM), gender dan orientasi kepada klien. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa semua negara harus mengupayakan pelayanan kesehatan reproduksi yang dapat dijangkau oleh semua orang sesuai umur dan kebutuhan pada siklus hidupnya, melalui sistem pelayanan kesehatan dasar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum tahun 2015 (*Universal Access to Reproductive Health 2015*).

Konsep ICPD tentang kesehatan reproduksi tidak secara eksplisit tercantum di dalam *framework Millenium Development Goals* (MDGs). Namun pada *World Summit 2005* dengan tegas dinyatakan bahwa kesehatan reproduksi berperan penting dalam mencapai *gender-and health-related to MDGs* dengan rekomendasi bahwa kesehatan reproduksi harus diintegrasikan ke dalam tujuan pembangunan MDGs dengan mengembangkan mekanisme monitoring MDGs untuk mencapai akses universal kesehatan reproduksi.

Saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2015. Walaupun sudah banyak kemajuan yang dicapai, tetapi masih diperlukan kerja keras untuk mencapai sasaran MDGs utamanya untuk target 5, penurunan angka kematian ibu dan menjamin akses universal terhadap kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu agenda MDGs yang belum selesai. Karena itu, untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dengan mengurangi ketidakadilan, kesenjangan akses, dan penggunaan layanan kesehatan maka capaian indikator akses universal kesehatan reproduksi harus tetap konsisten dipantau dan ditingkatkan.

Tujuan pembangunan dalam MDGs sebagai nomenklatur tidak akan berhenti di tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, utamanya bagi agenda yang belum selesai, telah dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs.

Tahun 2008 *World Health Organization* (WHO) dan *United Nation Fund Population* (UNFPA) menyusun *National level monitoring of the Achievement of Universal Access to Reproductive Health* yang berisi kumpulan indikator untuk membantu negara-negara dalam memantau pemenuhan hak reproduksi melalui pencapaian akses universal kesehatan reproduksi. Melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan lintas program, lintas sektor terkait, dan beberapa daerah intervensi, buku ini diadaptasi dalam konteks Indonesia, yaitu dengan menyepakati 93 Indikator dari 109 indikator AUKR yang

tersedia dan dapat dipantau di Indonesia. Sembilan puluh tiga indikator tersebut didapatkan melalui data yang diperoleh dari laporan rutin, survei, pengolahan data sederhana pada 10 sektor terkait, yaitu: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian.

Mengingat data yang dibutuhkan tersebar pada 10 sektor, maka diperlukan komitmen tinggi dan peran aktif dari setiap sektor/lembaga terkait dalam penyediaan data AUKR baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di pusat. *Evidence based* terhadap capaian/kemajuan upaya pemenuhan hak reproduksi dapat bermanfaat dalam mengembangkan program dan kebijakan kesehatan reproduksi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemantauan pencapaian akses universal kesehatan reproduksi harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan, sehingga hak reproduksi dapat terpenuhi dan tujuan penurunan angka kematian ibu dapat tercapai.

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA,



dr. Anung Sugihantono, M.Kes

NIP 196003201985021002

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Tabel dan Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Dasar Hukum	6
Bab 2. Indikator Akses Universal Kesehatan Reproduksi	9
2.1 Indikator Kebijakan	11
2.2 Indikator Pelayanan	18
2.3 Indikator Akses	29
2.4 Indikator Dampak	41
Bab 3. Mekanisme Penyediaan Data Akses Universal Kesehatan Reproduksi	49
3.1. Mekanisme Penyediaan Data Akses Universal Kesehatan Reproduksi di Tiap Sektor	49
3.2 Mekanisme Penyediaan Data Akses Universal Kesehatan Reproduksi di Lintas Sektor	50
3.3 Langkah Lanjutan	52
Bab 4. Penutup	73

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19614

